ANALISIS KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN, KEPUASAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dora Cristina Natalia Sipahutar¹, Nurlinda², Rini Indahwati³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan

Email: dora.sipahutar@gmail.com¹, nurlinda@polmed.ac.id², riniindahwati@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Kualitas Laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Penatausahaan Keuangan, Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Metode penelitian kombinasi (*mix method*) merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif dengan objek penelitian adalah pejabat penatausahaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang dalam hal ini ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Perangkat Kerja Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, seperti Peraturan dan Undang-undang terkait dokumen atau surat yang diterbitkan oleh OPD yang dapat mendukung penelitian ini, serta aturan hukum atau kebijakan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian. Teknik Analisa data dilakukan dengan pengumpulan data, hasil pengumpulan data lalu di ringkas kemudian analisa, hasil analisa disajikan dan dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Penatausahaan Keuangan, Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah baik ditinjau dalam kecilnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan telah memanfaatkan teknologi sistem informasi, namun belum masih terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kepuasan Dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Kualitas Penatausahaan Keuangan.

ABSTRACT

The quality of financial reports significantly impacts accountability. High-quality reports demonstrate dedication to accountability or responsibility for the financial reports produced. The purpose of this study is to examine the quality of financial administration, user satisfaction

with information technology, and its role in improving the quality of local government financial reports. This research employs a mixed-method approach, combining both quantitative and qualitative methods. The research objects include financial administration officials from the Health Office, the Public Works and Housing Office, and the Population and Civil Registration Office. Primary data for this study come from direct sources or first-hand information obtained through interviews with informants related to the research issue, specifically Financial Management Officials (PPK) in regional work units. Secondary data are obtained indirectly from documents, literature, and other relevant sources, including regulations, laws, and documents issued by regional offices that support the research, as well as applicable legal rules or policies related to the study. Data analysis involves collecting data, summarizing the results, analyzing them, presenting the findings, and drawing conclusions. The research findings indicate that the quality of financial administration and user satisfaction with information technology in improving local government financial reports are satisfactory. This is evident from the minimal errors in financial report preparation and decision-making utilizing information technology systems. However, there are still challenges related to human resources.

Keywords: *Financial Reports, Satisfaction With Information Technology Use, Quality Of Financial Administration.*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penatausahaan keuangan daerah (Andini, (2015); Yunus Madika, (2015); Ni Made Sudirianti, (2015); Hairul, (2012); Irwan, (2011); Ernasari, (2013); Julianet, (2013).

Kualitas Laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang dibuat. (Setyowati et al, 2016)

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena yang

terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2010.

Hasil Opini Audit BPK perwakilan Sumatera Utara Tahun 2022 dari 34 Kabupaten Kota ada 5 (lima) Kabupaten kota yang mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 29 (Dua Puluh Sembilan) mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 379 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 34 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan temuan sebanyak 344 dan rekomendasi sebanyak 1.509. Dari pemeriksaan keuangan terhadap 34 LKPD tahun 2021 di wilayah Sumatera

Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 24 LHP LKPD dengan Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) dan 10 LHP dengan opini wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Hasil Pemeriksaan mengungkapkan 113 permasalahan administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 menunjukkan dari 45 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 730 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yakni 1) permasalahan ketidakpatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi), serta 2) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan).(<https://sumut-pid.bpk.go.id>) . Sejak Tahun 2018 Kota Sibolga telah mendapatkan Opini WTP.

Opini ini menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga 5 (lima) tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*). Kota Sibolga yang termasuk dalam kabupaten/kota dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas laporan keuangan pemerintah kota Sibolga. Pada tahun 2016 kota Sibolga mendapat *No Comment (TMP)*, kemudian pada tahun 2017 kota Sibolga mengalami peningkatan sikap *Fairness to Exception (FTP)* dan sejak tahun 2018 Pada tahun 2020, kota Sibolga memiliki opini yang

stabil. Dimana walaupun pada tahun-tahun tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun tetap saja, ditemukan beberapa masalah dalam penyusunan LKPD yang belum sesuai dengan SAP mengenai alih fungsi anggaran pada laporan keuangan kota Sibolga tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu BPK mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan tidak akan ada masalah. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan progres yang semakin membaik dengan diberikannya opini WTP. Akan tetapi opini WTP tersebut tidak menggambarkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik. BPK masih memberikan catatan-catatan terhadap laporan dimaksud seperti adanya kesalahan administrasi.

Menurut Wahyuni, Fadah, & Tobing, (2018) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin dimanfaatkannya teknologi informasi Laporan keuangan akan semakin berkualitas .Menurut Jaafreh (2017), bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Semakin Puas Pengguna menunjukkan semakin kompeten pengguna menggunakan teknologi informasi maka semakin berkualitas laporan keuangan.

Pada Pemerintah kota Sibolga dalam penatausahaan keuangan sudah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi yang menunjukkan fakta adanya kemudahan dalam penatausahaan

keuangan selain itu menurut data kepuasan penggunaan teknologi informasi yang ditunjukkan pada kecilnya revisi yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) laporan keuangan dalam standar akuntansi adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik untuk memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan
- d) Dapat dipahami

Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan memiliki kata dasar yaitu tata usaha. Tata usaha memiliki arti yaitu administrasi, penyelenggaraan kegiatan tulis-menulis dalam bidang keuangan dan bidang lain dalam perusahaan atau negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan

yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya

Dimensi Kualitas Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan Keuangan Daerah menurut Teori Djanegara (2017):

a. Pembukuan

Pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan. Moerhamadi dalam teorinya menyebutkan bahwa pembukuan merupakan siklus yang terdiri dari serangkaian kegiatan, diantaranya pencatatan, pengumpulan data/transaksi, pengelompokan data, serta pencatatan bukti dari setiap data/transaksi yang ada.

Indikator dalam Pembukuan antara lain:

1. Pencatatan
2. Pengumpulan data
3. Pengelompokan data

4. Pencantuman bukti transaksi

b. Inventarisasi

Menurut kamus besar Indonesia (2007), ada dua pengertian inventarisasi, yaitu inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan dan sebagainya.

Indikator Inventarisasi:

1. Bukti Inventarisasi dari Perbendaharaan
2. Inventarisasi dilakukan secara periodik

c. Pelaporan

Tahapan terakhir dari Penatausahaan Keuangan Daerah menurut Teori Djanegara (2017) adalah pelaporan. Laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembukuan dan inventarisasi menginformasikan mengenai posisi keuangan daerah, baik itu aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas, dan lain sebagainya.

Indikator dari Pelaporan antara lain:

1. Penyajian Dokumen
2. Jangka waktu pelaporan

Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi

menurut Kaukab dan Lufthiadi (2021) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku

sikap akuntan menggunakan teknologi informasi meliputi pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja dengan manfaat agar proses pelaporan keuangan berjalan dengan baik. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, mengelola informasi, sistem manajemen serta proses kerja secara komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam mengambil keputusan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut (Rifandi, 2018). Saat ini, pemerintah daerah menggunakan software SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) internal pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun laporan keuangan. Software SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

Dimensi Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi

Menurut Kotler yang dikutip dalam (Meijina, 2021), kepuasan

penggunaan adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh seseorang yang memakai sebuah produk. Apabila suatu produk dapat memenuhi harapan individu, maka tingkat kepuasan pengguna akan meningkat, sebaliknya jika produk tidak dapat memenuhi harapan individu, maka tingkat kepuasan individu tersebut akan rendah. Dari berbagai macam pengertian mengenai kepuasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan penggunaan teknologi informasi merupakan tanggapan atas penggunaan teknologi informasi setelah memakai informasi. Kepuasan penggunaan merupakan hal yang bersifat subjektif dan tidak mutlak mengenai seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan pengguna teknologi informasi Doll dan Torkzadeh dalam (Adesurya, 2019) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi kepuasan penggunaan teknologi informasi yang diuraikan berikut:

- a. Isi (*content*) Dimensi ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi mampu memberikan informasi untuk pengguna sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
- b. Akurasi (*accuracy*) Dimensi ini berhubungan dengan tingkat ketepatan sistem teknologi informasi ketika data dimasukan kemudian diolah menjadi informasi. Tingkat keakuratan teknologi informasi ini diukur dari seberapa banyaknya kesalahan yang terjadi ketika mengolah data.
- c. Kemudahan Pemakaian (*ease of use*) Dimensi ini mengukur tingkat kemudahan dalam memahami dan mempelajari teknologi informasi.

Pengguna merasa terbantu apabila sistem 23 informasi yang digunakan bersifat user friendly saat pengguna mengolah data dan mendapatkan informasi yang diperlukan.

- d. Tepat Waktu Dimensi ini mengukur tingkat kemampuan sistem informasi mampu untuk memberikan informasi yang terbaru dengan tepat dan lengkap. Tepat waktu dikategorikan dengan sistem yang memberikan informasi terbaru, sehingga setiap permintaan dari pengguna akan diproses oleh sistem saat itu juga tanpa jeda waktu yang lama.

Indikator Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi

Indikator merupakan sebuah variabel kendali dan biasanya digunakan dalam sebuah kegiatan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Selain itu, indikator dapat diartikan sebagai suatu ciri atau bentuk perubahan pada sebuah bidang tertentu. Indikator juga dapat digunakan sebagai evaluasi keadaan dalam pengukuran terhadap perubahan yang terjadi terus-menerus. Dari beberapa definisi indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kepuasan pengguna adalah suatu arah yang disajikan untuk mengukur kepuasan pengguna dari sebuah perpustakaan yang ada. Ada beberapa indikator kepuasan pengguna menurut Irwan, (2011) yang dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini.

- a. Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna

Hal yang harus diperhatikan oleh suatu pelayanan dalam kepuasan pengguna yaitu melayani dengan sepenuh hati karena kepuasan pengguna dimulai dari hati. Apabila suatu sistem informasi memberikan layanan secara efisien dan efektif kepada pengguna maka pengguna akan merasa puas dengan sistem informasi tersebut.

- b. Totalitas

Memberikan Layanan harus secara totalitas Baik itu dalam usaha memenuhi kebutuhan pengguna, kelengkapan informasi mengenai bahan pustaka yang sedang dicari, dan kelayakan sistem informasi yang disediakan.

- c. Kenyamanan

Peningkatan kualitas dalam sebuah layanan dapat dilihat dari kenyamanan pengguna dalam pelayanan yang diberikan. Bentuk dari kenyamanan penggunaan yaitu kemudahan mereka dalam mengakses dan mencari informasi buku atau bahan pustaka lainnya pada sistem yang telah Penelitian Terdahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Vebrianto et al, (2020) Metode penelitian kombinasi (*mix method*) merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Selain menjawab persoalan-persoalan penelitian yang telah disebutkan, metode penelitian kombinasi memberikan jawaban yang jauh lebih komperhensif dari pada hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif saja atau metode penelitian kualitatif saja. Obyek dalam penelitian ini

terfokus kepada Kualitas Penatausahaan, Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Sumber dan Teknik pengumpulan data

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut Nuvitasari *et al.*, (2019) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa interview atau pengamatan terhadap objek tertentu. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang dalam hal ini ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Jumlah Responden untuk diwawancarai sebanyak 3(tiga) orang yang mana berasal dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).

b) Data Sekunder

Menurut Nuvitasari *et al.*, (2019) data sekunder merupakan data yang dicatat/diperoleh dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, seperti Peraturan dan Undang-undang terkait dokumen atau surat yang diterbitkan oleh OPD yang dapat mendukung penelitian ini, serta aturan hukum atau kebijakan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data

responden kuisisioner ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan staf program dan keuangan sebanyak 7 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap kenyataan atau realitas. Dalam penelitian ini menggambarkan transparansi informasi akuntansi OPD Pemerintah Kota Sibolga.

Tahapan yang dilakukan adalah setelah data primer diperoleh melalui pemberian Kuisisioner kepada Pejabat Penata usahan keuangan sebagai studi

awal kemudian dari kuisioner tersebut beberapa pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban terkait penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dari informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan merupakan data yang dapat mendukung Analisa dari fenomena yang diteliti yaitu Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi di OPD Pemerintah Kota Sibolga.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan agar data yang telah didapatkan lebih mudah untuk dianalisis dan kemudian dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang

telah dilakukan dengan Analisis Statistik Deskriptif

Berikut *rating scale* yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel Kategori Penilaian Tanggapan Responden

No	Rentang Skala	Keterangan
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Cukup Tinggi
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Rekapitulasi hasil kuesioner

No	Pernyataan	Hari Kuisioner					SKOR Rata-Rata	Rata-rata	Ket
		STS	TS	BR	S	SS			
Kualitas Laporan keuangan									
1	Laporan Keuangan memiliki manfaat usapan balik (<i>feedback value</i>)			3	4	32	4,57		Sangat tinggi
2	Laporan Keuangan memiliki manfaat prediktif (<i>predictive value</i>)			2	3	33	4,71		Sangat tinggi
3	Apakah Laporan Keuangan dilaporkan dengan Tepat waktu			6	1	29	4,14		Tinggi
4	Laporan Keuangan disajikan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku		1	4	2	29	4,14		Tinggi
5	Informasi Laporan Keuangan disajikan secara jujur dan wajar			4	3	31	4,42		Sangat tinggi
6	Informasi Laporan Keuangan yang disajikan dapat diac dan hasil uji yang dilakukan beberapa kali memiliki hasil yang tidak jauh beda			1	3	3	30	4,28	Sangat tinggi
7	Informasi diarahkan pada kebutuhan utama dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu			5	2	30	4,28		Sangat tinggi
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna				7	35	5		Sangat tinggi
9	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya			1	4	2	29	4,14	Tinggi
Total		0	0	3	31	29	278	4,49	Sangat tinggi
Kualitas Penatausahaan Keuangan									
1	Penatausahaan sudah dilakukan dengan teknologi Informasi/ Aplikasi			4	3	33	4,42		Sangat tinggi
2	Proses Pencatatan sudah dilakukan melalui Aplikasi			3	4	32	4,57		Sangat tinggi
3	proses pengumpulan data tidak pernah terjadi keterlambatan			1	4	2	29	4,14	Tinggi
4	Penatausahaan sudah menyelesaikan setiap transaksi Keuangan			4	3	31	4,42		Sangat tinggi

Sumber : Data diolah Tahun 2024

Berdasarkan rekapitulasi jawaban kuesioner atas variabel kualitas laporan

keuangan pada Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas DUKCAPIL, Dinas PU dan PR dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah baik (sangat tinggi) dengan nilai 4,40 yang berarti memenuhi sebagian besar indikator dari Relevan, Andal, Dapat dipahami, Dapat Dibandingkan, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan, kondisi ini didukung oleh hasil penelitian dari Laila et al., (2016) Laporan keuangan Pemerintah Daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan Masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai.

Hasil Rekapitulasi jawaban kuesioner atas variabel Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah pada Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Dinas PU dan PR dan Dinas Dukcapil dengan hasil pengolahan data bernilai 4,48 ((sangat tinggi) yang berarti secara keseluruhan memenuhi indikator dan berdasarkan kuisisioner, penatausahaan keuangan sudah menggunakan Aplikasi mulai dari Pencatatan, Inventarisasi sampai dengan Pelaporan secara tepat waktu kondisi ini sesuai dengan Penelitian Bella (2023) menunjukkan adanya hubungan antara Penatausahaan Keuangan dengan kualitas laporan keuangan dalam hal serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menunjukkan skala baik

Hasil Rekapitulasi jawaban kuesioner atas variabel Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi pada

Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Dinas PU dan PR dan Dinas Dukcapil dengan nilai 4,66 (sangat tinggi) yang berarti secara keseluruhan memenuhi indikator dan berdasarkan kuisisioner, Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi sudah menggunakan Aplikasi, dan teknologi Informasi yang ada memberikan manfaat berupa kemudahan bagi Pejabat Penatausahaan keuangan dalam membuat laporan keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian Jaafreh (2017), bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Semakin Puas Pengguna menunjukkan semakin kompeten pengguna menggunakan teknologi informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a) Kualitas Pelnatausahaan Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Lapolran Keuangan Pelmelrintah Daelrah

Belum optimal inventarisasi pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga dikarenakan pejabat pengelola keuangan Dinas Kesehatan Kota Sibolga belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu fungsi pengawasan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan. Kualitas Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan belum optimal dibandingkan (dua) SKPD lain bila dianalisis dari indikator pengumpulan data dengan dikarenakan budaya kerja yang bersifat monoton serta tidak adanya pemberlakuan reward dan *punishment*, disamping hal tersebut juga dipengaruhi oleh penempatan Sumber Daya

Manusianya yang masih belum mempertimbangkan faktor kompetensi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Riana (2022) bahwa rendahnya kinerja PNS dipengaruhi oleh budaya kerja dan kemampuan kerja, sehingga tidak memberikan capaian kinerja yang dapat mendukung keberhasilan dari suatu organisasi.

- b) Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Indikator Teknologi Informasi bekerja secara totalitas terdapat hasil dimana 3 (Tiga) SKPD yang telah diwawancarai menjelaskan bahwa Teknologi Informasi sudah bekerja namun masih memiliki kendala pada jaringan (*server*) yang mengakibatkan sistem informasi tersebut harus menunggu perbaikan dari pusat sehingga pengguna di daerah menunggu dan tidak bisa langsung mengakses. Masih adanya kendala pada Sumber Daya Manusia yang masih belum kompeten hal ini disebabkan adanya penetapan pegawai yang belum tepat dengan tupoksi sehingga mengakibatkan kesulitan dalam proses penggunaan teknologi sehingga belum maksimal. Sistem Informasi memberikan manfaat dan kepuasan kepada pengguna dimana hal ini dapat dilihat dari penyelesaian laporan keuangan yang memudahkan pengguna dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Saran

- a. Dalam pemetaan dan pendistribusian pegawai pada

jajaran OPD yang berada di bawah Pemerintahan Kota Sibolga, sebaiknya Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga merubah *mindsed* dalam manajemen kepegawaian dan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga, frekuensi beban kerja di masing – masing OPD dengan menerapkan prinsip “*The right man on the right place*”, yang dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Desentralisasi server dapat membantu mencegah akses web yang lambat dengan mendistribusikan beban trafik secara merata ke berbagai server di lokasi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan beban pada satu server tunggal dan meningkatkan kinerja serta keandalan sistem secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Janelgara, Molelrmahadi S. 2017. *Lapolran Keuangan Pelmelrintah Daelrah: Telolri, praktik dan Pelrmasalahan*. Bolgolr: Kelsatuan Prelss
- Elnasari, Syaiful, Aprila, Nila (2013). *Pelngaruh Sistelm Akuntansi Pelmelrintah Daelrah dan Pelnatausahaan Keuangan Daelrah telrhadaP Pelngellollaan Keuangan Daelrah Jurnal Fairnelss*.(Tahun 2013 Vollumel 3 Nolmolr 3.)

- Julianelt Farrah (2013). *Pelngaruh Pelnatausahaan Keuangan Daelrah Telrhadao Pelnelrapan Golold Golvelrnancel dan Implikasinya Kualitas Infolrmasi Keuangan Pada BPKAD Pelmda Papua*. Jurnal Akuntansi. Unvelrsitas Kolmputelr Indolnlesia
- Kottlelr dan Kellelr, (2016). *Markelting Managemelnt glolbal elditioln, Pelarsoln, EIngland*
- Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 58 Tahun 2005 telntang Pelngellolloan Keuangan Daelrah
- Pelraturan Pelmelrintah Nol. 71 tahun 2010 telntang Standar Akuntansi Pelmelrintah
- Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 77 tahun 2020 Peldolman Pelngellolloan Keuangan Daelrah
- Rahman Dicky (2015) *Pelngaruh Pelmanfaatn Telknollolgi Infolrmasi, Pelnelrapan Sistem Akuntansi Keuangan Daelrah, dan Pelnelrapan Standar Akuntansi Pelmelrintahan Telrhadao Kualitas Lapolran Keuangan Daelrah*. Jurnal Jolm FEIKOIN Voll. 2 (2)
- Sugiyolnol. (2016). *Meltolde Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Wahyuni, S., Fadah, I., & Tolbing, D. S. (2018). *Pelngaruh Kolmpeltelnsi Sumbelr Daya Manusia dan Pelmanfaatn Telknollolgi Infolrmasi Telrhadao kualitas Lapolran Keuangan Mellalui Pelngellolloan Barang Milik Daelrah*. *Bisnis Dan Manajelmeln*, 12, 66–80.